PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA KERJA

RENJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I. PENDAHULUAN ..... Bab. I | 1
1.1. Latar Belakang ..... Bab. I | 1
1.2. Landasan Hukum ..... Bab. I | 4
1.3. Maksud dan Tujuan ..... Bab. I | 7
1.4. Sistematika Penulisan ..... Bab. I | 7
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU. ..... Bab. II | 1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... Bab. II | 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... Bab. II | 17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... Bab. II | 35
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ..... Bab. II | 42
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .... Bab. II | 51
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..... Bab. III | 1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..... Bab. III | 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri ..... Bab. III | 9
3.3. Program dan Kegiatan ..... Bab. III | 10
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... ..... Bab. IV | 1
BAB V. PENUTUP ..... Bab. V | 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 .....Bab. II | 13

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.....Bab. II | 27

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026..... .....Bab. II | 45

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....Bab. III | 13

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025.....Bab. IV | 2

Tabel 5.1 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....Bab. IV | 4

Tabel 5.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....Bab. IV | 7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Penyusunan Renja Perangkat Daerah .....Bab. I | 3
Gambar 3.1 Sasaran Pembangunan Tahun 2026 .....Bab. III | 1
Gambar 3.2 Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 .....Bab. III | 3

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2026

RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (tahun). dalam penyusunan dokumen renja PD, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang serta dengan pemangku kepentingan.

Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam proses penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan

   Persiapan penyusunan Renja PD meliputi:

   a. Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

   Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup:

   a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
   b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

   Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPERIDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah dan harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

   Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPERIDA. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

   Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang

RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. BAPPERIDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Sehingga Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 menjadi pedoman Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam menyusun RKA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, dengan melihat kondisi terkini dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri 2025-2029. Secara diagramatis alir penyusunan rencana kerja itu dapat dilihat pada gambar berikut:

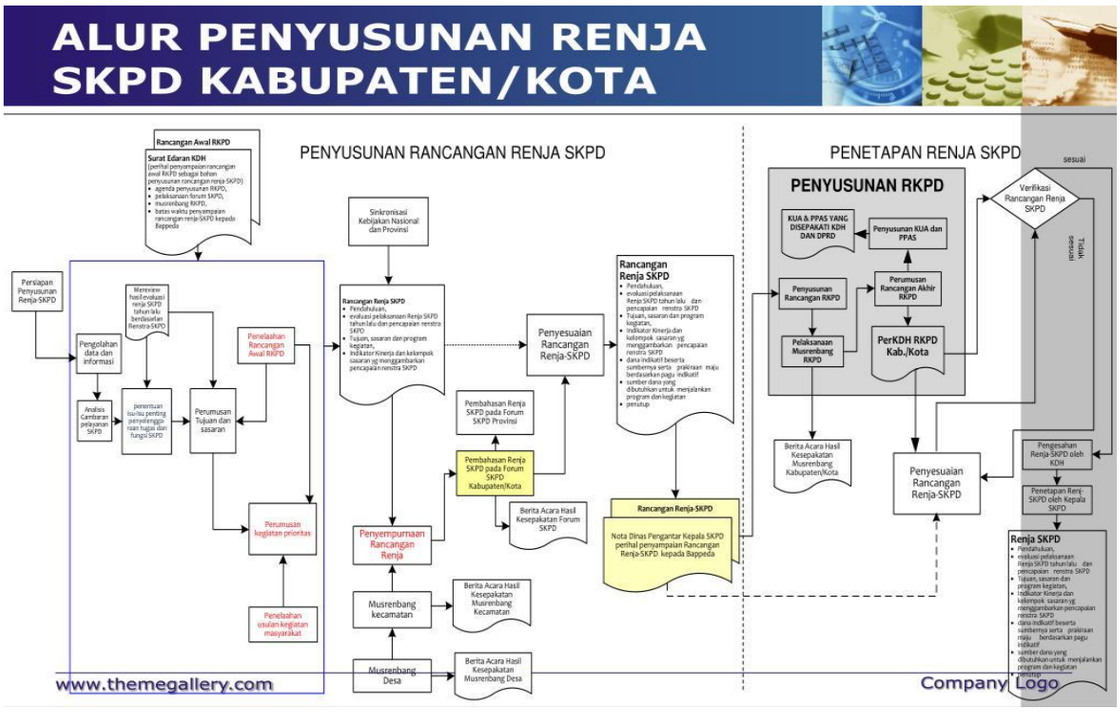

Gambar 1.1 Diagram Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum disusunnya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

17. Permendagri nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 175;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187). Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor196).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri;
23. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

24. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
26. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dimaksudkan untuk memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Wonogiri dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2026. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi lebih terarah, efektif, efisien dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

a) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026;
b) Menyiapkan rencana program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2026;
c) Menyusun indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai, guna mencapai sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri; dan
d) Menetapkan pendanaan indikatif untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dokumen ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Wonogiri. Pada bagian ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dan capaian Renstra tahun lalu ini mengusung Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun

2024 beserta indikator, target dan capaian di dalamnya dan dihasilkan sebagai berikut:

PROGRAM NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah. Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase Perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK). Target sebesar 6,4% dan realisasi 12,8 / dengan capaian kinerja sebesar 200%.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan. Target sebesar 57,20% dan realisasi 78,72% / dengan capaian kinerja sebesar 137,62%.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi. Target 1,21% dan realisasi 5,48% / dengan capaian kinerja sebesar 452,89 %.
4. Program Hubungan Industrial, dengan indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Target sebesar 12% dan realisasi 18,5% / dengan capaian kinerja sebesar 154,17%.

PROGRAM URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Target sebesar 17,75% dan realisasi 17,75% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Target sebesar 4% dan realisasi 4,5% / dengan capaian kinerja sebesar 112,50%.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Target sebesar 0,48% dan realisasi 0,70% / dengan capaian kinerja sebesar 145,83%.

KEGIATAN NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.

Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun. Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase tertib administrasi kepegawaian. Target sebesar 100% dan realisasi 500% / dengan capaian kinerja sebesar 500%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah. Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum. Target sebesar n/a% dan realisasi n/a% / dengan capaian kinerja sebesar n/a%.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan indikator Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun. Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan indikator Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi. Target sebanyak 2.120 orang dan realisasi 3.093 orang / dengan capaian kinerja sebanyak sebesar 145,90%.
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan indikator Jumlah program pelatihan yang sudah *link and match* dengan Perusahaan. Target sebanyak 10 program dan realisasi 11 program / dengan capaian kinerja sebesar 110%.

4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan indikator Persentase LPK yang memiliki perizinan. Target sebesar 100% dan realisasi 100% / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. Target sebanyak 7.250 orang dan realisasi 7.602 orang / dengan capaian kinerja sebesar 104,86%.
6. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan indikator Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun *link and match*-nya. Target sebanyak 7.000 lowongan kerja dan realisasi 17.958 lowongan kerja / dengan capaian kinerja sebesar 256,54%.
7. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pencari kerja migran yang ditempatkan. Target sebanyak 50 orang dan realisasi 93 orang / dengan capaian sebesar 186%.
8. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase TKA yang terdata. Target sebesar n/a% dan realisasi n/a% / dengan capaian kinerja sebesar n/a%.
9. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Perusahaan yang mempunyai sarana HI. Target sebanyak 10 perusahaan dan realisasi 10 perusahaan / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
10. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan. Target sebanyak 10 perusahaan dan realisasi 10 perusahaan / dengan capaian kinerja sebesar 100%.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Target sebesar 1,25% dan realisasi 3,77% / dengan capaian kinerja sebesar 301,60%.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Sistem Informasi

Industri Nasional (SIINas). Target sebanyak 8 IUI (Izin Usaha Industri) dan realisasi 9 IUI / dengan capaian kinerja sebesar 112,50%.

3. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Target sebanyak 12 Kecamatan dan realisasi 12 Kecamatan / dengan capaian sebesar 100%.

SUB KEGIATAN NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Target sebanyak 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Target sebanyak 44 orang/bulan dan dan realisasi 38 orang/bulan / dengan capaian kinerja sebesar 86,36%.
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Target sebanyak 6 orang pegawai dan realisasi 19 pegawai / dengan capaian kinerja sebesar 316,67%.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan, dengan indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target sebanyak 4 paket dan realisasi 6 paket / dengan capaian kinerja sebesar 150%.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target sebanyak 4 paket dan realisasi 6 paket / dengan capaian kinerja sebesar 150%.
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Target sebanyak 30 paket dan realisasi 30 paket / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun. Target sebanyak 4 paket dan realisasi 11 paket / dengan capaian kinerja sebesar 275%.
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah perjalanan dinas keluar daerah selama satu tahun.

Target sebanyak 24 laporan dalam setahun dan realisasi 42 laporan / dengan capaian kinerja sebesar 175%.

9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat. Target 7 laporan dan realisasi 7 laporan / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan. Target sebanyak 36 laporan dan realisasi 36 laporan / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Target sebanyak 12 laporan dan realisasi 12 laporan / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Target 30 unit dan realisasi 35 unit / dengan capaian kinerja sebesar 116,67%.
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target sebanyak 25 unit dan realisasi 25 unit / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas. Target sebanyak 2 unit dan realisasi 2 unit / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Target sebanyak 12 unit dan realisasi 12 unit / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah unit peralatan mesin dan lainnya yang disediakan. Di tahun 2024 tidak terdapat pengadaan.

SUB KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Pelayanan antar Kerja, dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL. Target sebanyak 5.000

orang dan realisasi 7.509 orang / dengan capaian kinerja sebesar 150,18%.

2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, dengan indikator Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan. Target sebanyak 1.700 orang dan realisasi 1.780 orang / dengan capaian kinerja sebesar 104,71%.
3. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, dengan indikator Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD. Target sebanyak 10 orang dan realisasi 40 orang yang mendapat fasilitasi ULD / dengan capaian kinerja sebesar 400%.
4. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online, dengan indikator Jumlah data dan informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online. Target sebanyak 12 dokumen dan realisasi 12 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, dengan indikator Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karir Hub). Target sebanyak 600 orang dan realisasi 1.257 orang / dengan capaian kinerja sebesar 209,50%.
6. Job Fair/Bursa Kerja, dengan indikator Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja. Target sebanyak 750 orang dan realisasi 790 orang / dengan capaian kinerja sebesar 105,33%.
7. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan indikator Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya. Target sebanyak 5 orang dan realisasi 15 orang / dengan capaian kinerja sebesar 300%.
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase Tenaga Kerja Asing yang teridentifikasi. Di tahun 2024, sub kegiatan ini tidak ada.
9. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan indikator Jumlah perusahaan yang menyusun RTK Mikro. Target sebanyak 5 perusahaan dan realisasi 10 perusahaan / dengan capaian kinerja sebesar 200%.
10. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

pada tahun n. Target sebanyak 2.000 orang dan realisasi 3.028 orang/ dengan capaian kinerja sebesar 151,40%.

11. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja, dengan indikator Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n. Target sebanyak 10 lembaga dan realisasi 12 lembaga / dengan capaian kinerja sebesar 120%.
12. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja. Target sebanyak 5 unit dan realisasi 5 unit / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
13. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan indikator Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina. Target sebanyak 28 lembaga dan realisasi 37 lembaga / dengan capaian kinerja sebesar 132,14%.
14. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi, dengan indikator Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi. Target sebanyak 7 perizinan dan realisasi 10 perizinan / dengan capaian kinerja sebesar 142,86%.
15. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan, dengan indikator Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online. Target sebanyak 10 perusahaan dan realisasi 10 perusahaan / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
16. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan, dengan indikator Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan. Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
17. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah perselisihan yang dicegah. Target sebanyak 50 perkara dan realisasi 50 perkara / dengan capaian kinerja sebesar 100%.

18. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan. Target sebesar 3 perkara dan realisasi 3 perkara / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
19. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah LKS Tripartit yang dibina. Target sebanyak 1 lembaga dalam setahun dan realisasi 1 lembaga / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
20. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, dengan indikator Terlaksananya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Target sebanyak 500 orang dan realisasi 2.695 orang / dengan capaian kinerja sebesar 539%.

SUB KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi. Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Target sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen / dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari uraian Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2024, memberikan dampak positif bagi perkembangan Sasaran RPJMD 2021-2026 untuk Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian. Pada tahun 2024 ini, angka TPT mengalami kenaikan, dari 1,92% menjadi 2,40% yang disebabkan oleh dampak PHK perusahaan tekstil di Kabupaten Sukoharjo dan juga banyaknya calon tenaga kerja usia lulusan SMA/SMK (Generasi Z) yang terlalu memilah-milah pekerjaan.

Berikut kategori pencapaian Renja sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang tercapai sesuai dengan target renja **sebesar 100%** adalah sebagai berikut :
    1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
        a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
        b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
        c) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
        d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
        e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    2) Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
        a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
    3) Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan sebagai berikut:
        a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
        b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
    4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan sebagai berikut :
        a) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program dan Kegiatan yang tercapai sesuai dengan target renja, namun **kurang dari 100%** tidak ada.

3. Program dan Kegiatan yang sesuai dengan target renja, namun **lebih dari 100%** adalah sebagai berikut:
    1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
        a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
        b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
        c) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
    2) Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan sebagai berikut :
        a) Pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota;
        b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
        c) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota.
    3) Program Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut:
        a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
    4) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan kegiatan sebagai berikut :
        a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Untuk capaian sampai dengan tahun 2024, kegiatan yang telah mencapai 100% atau lebih, berada pada hampir seluruh Program dan Kegiatan yang ada.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan program dan kegiatan dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1) Seluruh kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan dengan upaya semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga seluruh kebutuhan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat terpenuhi dengan baik;
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini melebihi target dikarenakan tingginya antusias masyarakat/pencari kerja dalam mengikuti program-program pelatihan dan sebagai pengembangan inovasi WRP (*Work Readiness Program*) yang dikelola dengan pendanaan APBD oleh Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja dan Super Gen-Z yang dikelola dengan pendanaan APBN oleh UPTD BLK.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja. Program ini melebihi target dikarenakan banyak pencari kerja yang terserap dalam dunia kerja dan tersebar di berbagai sektor. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam rangka memberikan informasi kepada pencari kerja telah memaksimalkan penggunaan media sosial yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri seperti Live Instagram dan Twitter, mengoptimalkan penggunaan layanan aplikasi Sisnaker dan e-makaryo, serta menyelenggarakan Job Fair pada bulan Mei 2024.
4) Program Hubungan Industrial. Program ini mempunyai capaian 100% di kegiatan-kegiatannya yang berfokus pada penyelenggaraan penyusunan regulasi bagi perusahaan, pencegahan dan penyelesaian permasalahan di lingkungan industrial, dimana telah banyak perusahaan yang memiliki alat-alat Hubungan Industrial sebagai kelengkapan regulasi dan administrasi dalam pengembangan usaha.

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan selama tahun 2024 ini juga dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s.d TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah Yang Di Susun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	-	-	-	100%	50%	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s.d TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase Perusahaan Yang Telah Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	77,78%	5,7%	6,4%	12,8%	200%	7,1%	-	-
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Jenis Dokumen RTK Yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	-	-
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,27%	1,25%	1,21%	5,48%	452,89%	1,24%	0,105%	8,47%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.580 orang	8.795 orang	2.120 orang	3.093 orang	151,40%	2.400 orang	1.347 orang	56,12%
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Program Pelatihan Yang Sudah *Link and Match* Dengan Perusahaan	10 program	13 program	10 program	11 program	110%	10 program	5 program	50%
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	140%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	61,19%	78,87%	57,20%	78,72%	137,62%	58,03%	82,87%	142,81%
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Dan Ditempatkan	7.250 orang	7.499 orang	7.250 orang	7.702 orang	104,86%	7.250 orang	4.105 orang	56,62%
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja Yang Bisa Dibangun *Link and Match* Nya	10.000 loker	14.290 loker	7.000 loker	17.958 loker	256,54%	9.000 loker	8.255 loker	91,72%
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang	88 orang	50 orang	93 orang	186%	100 orang	63 orang	63%
	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/kota	Persentase TKA yang Terdata	100%	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s.d TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	14%	16,33%	12%	18,5%	154,17%	13%	-	-
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Mempunyai Sarana HI	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	100%	10 perusahaan	-	-
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menindaklanjuti Pembinaan Ketenagakerjaan	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	10 perusahaan	100%	10 perusahaan	6 perusahaan	60%
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	17,85%	18,61%	17,75%	17,75%	100%	17,80%	-	-
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang diberdayakan	2%	17,87%	1,25%	3,77%	301,60%	1,5%	-	-
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	6%	2,99%	4	4,5%	112,50%	5%	1%	20%
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IUI yang diterbitkan	12 IUI	1.777 IUI	8 IUI	9 IUI	112,50%	10 IUI	3 IUI	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (s.d TW II 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,64%	1,36%	0,48%	0,70%	145,83%	0,56%	0,28%	50%
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Informasi Industri	16 Kecamatan	25 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%	14 Kecamatan	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, masing-masing Perangkat Daerah telah ditetapkan indikator kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut. Sehingga dalam pengukuran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis tersebut. Adapun indikator kinerja utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tujuan I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator : *Nilai Kematangan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian*

Target : 46

Faktor pendukung keberhasilan:

Pemahaman seluruh pegawai akan pentingnya Nilai Kematangan Organisasi agar apa yang menjadi tujuan OPD dapat tercapai dengan baik. Nilai Kematangan Organisasi menunjukkan bahwa suatu organisasi publik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan dan peran yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kematangan Perangkat Daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tersebut pada setiap variabel dan indikator

Faktor penghambat keberhasilan:

Kurangnya pemahaman akan Nilai Kematangan Organisasi yang sering kali menyebabkan kurangnya koordinasi antar pegawai dalam mewujudkan tujuan OPD.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Nilai Kematangan Organisasi ini pada tahun 2024 (tahun lalu) memiliki target nilai sebesar 45, namun realisasinya hanya tercapai 37 atau sebesar 82,22% dikarenakan terdapat komponen penilaian yang kurang memenuhi.

Sasaran I : Meningkatnya kinerja Disnakerin Kab. Wonogiri

Indikator : *Nilai SAKIP Disnakerin*

Target : 77,50

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Adanya kooperatif antar personal dalam kaitannya memberikan hasil capaian kinerja.

b. Melakukan monitoring secara berkala atas pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi.
c. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan baik dari BPK RI maupun BPKP/Inspektorat Provinsi/Kabupaten.
d. Probis (proses bisnis) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang telah berorientasi pada outcome.
e. Perencanaan kegiatan yang telah terintegrasi.
f. Pada masing-masing bidang perencanaan kegiatan sudah mengacu pada cascading.
g. Adanya *reward and punishment* untuk kinerja bidang-bidang.

Faktor penghambat keberhasilan:

- Hal yang menjadi penghambat jika tidak segera merespon rekomendasi penilaian SAKIP atau tidak segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi penilaian SAKIP tersebut.
- Adanya penetapan target yang terlalu besar ataupun terlalu kecil.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Dalam penilaian SAKIP 2024, terdapat komponen penilaian yang nilainya kurang memenuhi yakni Nilai Kematangan Organisasi, namun untuk nilai SAKIP di tahun 2024 mengalami kenaikan dari 78,05 (2023) menjadi 78,30 (2024) dengan kategori BB.

Indikator : *Indeks Profesionalitas ASN*

Target : 81

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Penilaian kinerja yang dilakukan telah berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS.
b. Penggunaan aplikasi HADIRKU untuk pelaksanaan absensi harian yang terintegrasi dengan aplikasi SiTAMPAN yaitu aplikasi perhitungan tunjangan dan potongan pelanggaran kedisiplinan.

Faktor penghambat keberhasilan:

a. Kurangnya sikap proaktif dari staff untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan jabatan.
b. Keterbatasan anggaran untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

Perbandingan dengan tahun lalu:

Perolehan nilai IP ASN di tahun 2024 sebesar 80,15, sedangkan untuk penilaian IP ASN sendiri dilakukan di akhir tahun.

Indikator : *Jumlah ASN Disnakerin yang menjadi Agen Perubahan*

Target : 4 orang

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Dorongan dan dukungan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri kepada seluruh Bidang dan UPTD BLK untuk lebih proaktif dan terus berinovasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan dan menjadi agen perubahan.
b. Kepala Dinas telah membentuk tim kreatif dan dari tim tersebut dilahirkan 2 inovasi yang menggerakkan lini/daya di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

Faktor penghambat keberhasilan:

Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjadi Agen Perubahan yang memiliki dampak positif bagi perkembangan instansi.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024, dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Wonogiri No. 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, telah ditetapkan sejumlah 4 (empat) orang sebagai Agen Perubahan yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kepala UPTD BLK dan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda.

Indikator : *Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian*

Target : 1

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Inovasi yang telah ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri mendapat dukungan dari semua pegawai agar dengan adanya inovasi tersebut dapat mencapai efektif dan efisien dalam bekerja.
b. Inovasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri bersifat *upgrading* yang berorientasi pada pelayanan publik dan target sasaran dinas.

Faktor penghambat keberhasilan:

Masih adanya keterbatasan anggaran untuk mengembangkan inovasi.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Tahun 2024, Inovasi yang telah dikembangkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian telah dilaporkan terkait WIA (Wonogiri *Innovation Award*) yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Wonogiri, yakni WRP (*Work Readiness Program*) dan Super Gen-Z.

- Program WRP (*Work Readiness Program*) dimana program ini menyasar ke penyiapan calon tenaga kerja dengan turun ke SMK-SMK agar mereka siap lebih dini.
- Super Gen-Z yakni Inovasi yang dikembangkan oleh UPTD BLK terkait dengan metode pembelajaran saat penyampaian materi pelatihan bagi peserta pelatihan di UPTD BLK Kabupaten Wonogiri.

Selain itu Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyelenggarakan Live Instagram (IG) secara berkala dengan berbagai narasumber dan topik-topik yang berbeda untuk berbagi informasi kepada pencari kerja sekaligus menambah wawasan seputar dunia kerja.

Indikator : *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*

Target : 91

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Penggunaan media online google form dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat penggunaan media online google form dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.
b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah melakukan mutasi pelayanan dari pelayanan offline ke online sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan dan memperoleh layanan dinas.

Faktor penghambat keberhasilan:

Hanya sebagian staff yang memahami pentingnya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.

Perbandingan dengan tahun lalu:

IKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada tahun 2024 memiliki capaian sebesar 91,94 dari target sebesar 91. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat telah dinilai cukup baik dan untuk dipertahankan.

Tujuan II : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator : *Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)*

Target : 96,70%

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Adanya kesempatan kerja yang tersedia
b. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan
c. Usia calon tenaga kerja dan jumlah angkatan kerja yang tersedia
d. Besarnya permintaan total masyarakat
e. Jumlah investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta
f. Kebijakan pajak dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan
g. Kerjasama dengan negara lain, untuk kesempatan kerja di luar negeri

Faktor penghambat keberhasilan:

a. Minimnya kesempatan kerja yang ada
b. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang rendah menyebabkan kurang dapat bersaing dengan pencari kerja lain yang lebih berkompeten
c. Kesesuaian latar bekakang pendidikan dan pengalaman pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Wonogiri sebesar 97,60% (100% - TPT = 100% - 2,40%). Sedangkan untuk 2024 ini perhitungan TKK masih menunggu dari BPS.

Sasaran II : Menurunnya Pengangguran

Indikator : *Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan*

Target : 58,03%

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Adanya inovasi Jendela Kerja yang dapat mendorong dan mengarusutamakan penempatan seperti Job Fair Virtual, Career Class, Live Instagram ("Ngos-ngosan"), pemanfaatan link portal lowongan kerja (Sisnaker dan e-Makaryo) dan upgrading fungsi BKK di SMK.
b. Kemampuan soft skill dan hard skill yang dimiliki pencari kerja.
c. Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh pencari kerja.
d. Kesesuaian lowongan kerja yang dilamar dengan kualifikasi pencari kerja.

Faktor penghambat keberhasilan:

a. Kurangnya kemampuan soft skill dan hard skill yang dimiliki pencari kerja
b. Kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh pencari kerja
c. Adanya ketidaksesuaian lowongan yang tersedia dengan minat pencari kerja

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024 Jumlah pencari kerja yang ditempatkan berasal dari perhitungan sebagai berikut:

(Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% = (7.602 : 9.657) x 100% = 78,72%

Sedangkan untuk tahun 2025, perhitungan secara keseluruhan akan dihitung di akhir tahun.

Indikator : *Besaran kompetensi calon tenaga kerja*

Target : 17,19%

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Adanya program WRP (*Work Readiness Program*) yang mendorong dalam hal peningkatan penyiapan calon tenaga kerja yang berorientasi ke pasar kerja seperti Aplikasi "AyoKerjo" dan bimtek unit penyiapan calon tenaga kerja dengan berorientasi pada future job.
b. Tingginya minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi mereka.
c. Adanya dorongan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan UPTD BLK untuk mendorong masyarakat mengikuti porgram pelatihan.
d. Adanya program pelatihan yang menarik/*up to date*.

Faktor penghambat keberhasilan:

Kurangnya minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan kompetensi dan juga adanya keterbatasan anggaran.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024, Besaran kompetensi calon tenaga kerja ini dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

(Jumlah calon tenaga kerja yang kompeten : Jumlah pencari kerja yang terdaftar) x 100% = (3.093 : 9.657) x 100% = 32,02%

Sedangkan untuk tahun 2025, perhitungan secara keseluruhan akan dihitung di akhir tahun.

Indikator : *Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun*

Target : 1,73%

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Peran aktif pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri khususnya di Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dalam membantu menyelesaikan sengketa pengusaha pekerja (Mediator).
b. Adanya sikap proaktif antara user (pengguna tenaga kerja) dengan tenaga kerja yang bersengketa.
c. Pemahaman akan aturan ketenagakerjaan dalam penyelesaian sengketa.

Faktor penghambat keberhasilan:

Hal yang menghambat penyelesaian sengketa pengusaha pekerja, yakni kurangnya proaktif perusahaan yang bersangkutan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dalam kaitannya sengketa dengan pekerjanya.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024, Jumlah perusahaan sampai akhir tahun 2024 setelah melewati pergerakan yang fluktuatif (karena perusahaan *merger*, tutup dan prioritas yang dihitung adalah perusahaan yang memiliki lebih dari 10 pegawai) didapat sebanyak 481 perusahaan. Maka, angka sengketa pengusaha pekerja per tahun sebagai berikut:

(Jumlah sengketa pengusaha pekerja : Jumlah perusahaan) x 100% = (3 : 481) x 100% = 0,62%.

Realisasi capaian kinerja perangkat daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagaimana terdapat dalam tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja yang telah mencapai/melampaui target pada tahun 2024 hingga Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :
    1) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (menggunakan data per Agustus 2024);
    2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (menggunakan data per Agustus 2024);
    3) Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
    4) Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan;
    5) Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
7) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan;
8) Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja;

2. Indikator kinerja yang belum mencapai target/belum dapat dihitung sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut :
   1) Nilai Kematangan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   2) Rasio Penduduk yang Berwirausaha;
   3) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
   4) Angka Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun;
   5) Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT).

Tujuan III: Meningkatkan Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro dan Makro

Indikator : *Rasio Penduduk yang Berwirausaha*

Target : 4,05%

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBe) terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan berwirausaha, khususnya bagi keluarga sangat miskin di Wonogiri;
b. Jiwa kewirausahaan seperti pantang menyerah, kerja keras, inovasi, dan optimisme pemilik usaha menjadi faktor utama dalam mengembangkan usaha. Pemilik usaha yang mampu beradaptasi, mencari peluang pasar, dan menjaga kualitas produk cenderung lebih berhasil;
c. Dukungan pemerintah dan sinergi stakeholder menjadi kunci dalam pengembangan ekosistem wirausaha, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun akses permodalan;
d. Jumlah penduduk usia kerja yang besar dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi, Wonogiri memiliki potensi sumber daya manusia yang luas untuk dikembangkan menjadi pelaku usaha baru.

Faktor penghambat keberhasilan:

a. Masih rendahnya kualitas SDM, baik dari sisi keahlian teknis maupun manajerial. Banyak pelaku usaha, terutama di desa, belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola usaha secara profesional;

b. Keterbatasan akses terhadap permodalan, bahan baku, dan infrastruktur pendukung sering menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang lebih jauh;
c. Banyak pelaku usaha di Wonogiri masih menghadapi kendala dalam pemasaran produk, baik karena keterbatasan jaringan, pengetahuan pemasaran digital, maupun fluktuasi pasar;
d. Kurangnya komitmen dari pengelola dan stakeholder terkait, serta minimnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sering menyebabkan program pengembangan wirausaha tidak berjalan optimal.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024, Rasio Penduduk yang Berwirausaha sebesar 3,96% dari target 3,95%. Sedangkan untuk 2025 ini perhitungan masih dilaksanakan di akhir tahun.

Sasaran II: Meningkatnya Pertumbuhan Pelaku Usaha Makro dan Mikro

Indikator : *Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)*

Target : 350 pengusaha

Faktor pendukung keberhasilan:

a. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Inovasi dan Smart City.

   Pemkab Wonogiri aktif membangun ekosistem inovasi dengan mencanangkan misi kota cerdas (Smart City) dan telah melahirkan 276 inovasi berbasis teknologi untuk mendukung pengembangan SDM dan ekonomi daerah. Upaya ini memperkuat fondasi bagi tumbuhnya PPBT melalui penguatan pendidikan berbasis iptek, pengembangan pusat data, aplikasi *e-Government*, dan konektivitas antar lembaga.
b. Dukungan Kebijakan dan Reformasi Birokrasi.

   Pemerintah daerah menerapkan reformasi birokrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kemudahan berinvestasi dan pelayanan perizinan yang mendukung iklim usaha inovatif. Hal ini menjadi insentif bagi pengusaha pemula yang ingin mengembangkan usaha berbasis teknologi.
c. Program Inkubasi dan Pelatihan Kewirausahaan Teknologi.

   Program seperti Wirausaha Merdeka (WMK) di perguruan tinggi sekitar, meski berbasis di Surakarta, memberikan pelatihan intensif, penguatan skill set, mindset, serta pembekalan teknis hardware dan software yang relevan. Program ini dapat menjadi inspirasi dan model bagi Wonogiri

dalam menyiapkan generasi wirausaha teknologi yang cerdas dan berdaya saing.

d. Akses Pembiayaan dan Pendampingan UMKM.
   Program seperti Mekaar PNM memudahkan pelaku usaha kecil dan mikro di Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pendampingan, yang juga dapat dimanfaatkan oleh pengusaha pemula berbasis teknologi.

Faktor penghambat keberhasilan:

a. Keterbatasan Kualitas SDM dan Literasi Teknologi.
   Tantangan utama adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi dan manajemen bisnis modern. Banyak pengusaha pemula belum memiliki skill dan knowledge yang cukup untuk bersaing di sektor teknologi.
b. Kurangnya Inkubator Bisnis dan Ekosistem Start-up Lokal.
   Belum optimalnya keberadaan inkubator bisnis atau program pendampingan khusus untuk PPBT di Kabupaten Wonogiri membatasi ruang tumbuh wirausaha teknologi lokal. Sebagian besar program inkubasi masih terpusat di kota besar atau perguruan tinggi luar daerah.
c. Akses Modal dan Infrastruktur Teknologi.
   Meski ada program pembiayaan, akses modal khusus untuk pengembangan usaha berbasis teknologi masih terbatas. Selain itu, infrastruktur digital dan teknologi di beberapa wilayah Wonogiri belum merata, sehingga membatasi ekspansi dan inovasi usaha teknologi.
d. Kurangnya Publikasi dan Jaringan Pasar.
   Inovasi yang dihasilkan sering kurang mendapatkan publikasi dan akses ke jaringan pasar yang lebih luas, sehingga adopsi teknologi dan penetrasi produk inovatif masih rendah.

Perbandingan dengan tahun lalu:

Di tahun 2024 Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) sebanyak 319 pengusaha dari target sebanyak 300 pengusaha. Sedangkan untuk tahun 2025, hingga bulan Mei terdapat 25 pengusaha.

Adapun target kinerja beserta capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.	Nilai Kematangan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	45	46	46	37	-	46	38	
2.	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	76,50	77,50	78,50	78,05	78,30	78,50	79.0	
3.	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	75	81	81,5	80,15	-	81,5		
4.	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang menjadi Agen Perubahan	-	-	3	4	5	4	4	5	5	
5.	Indeks Inovasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	-	1	1	1	2	2	1	1	
6.	IKM Dinas Tenaga Kerja	-	-	91	91	91	91,94	92,41	91	91,94	
7.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	-	-	96,40%	96,70%	97,00%	97,60%	97,60%	97,00%	97,68	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	-	-	3,60%	3,30%	3,00%	2,40%	2,40%	2,36%	2,32%	
9.	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	-	-	57,20%	58,03%	61,19%	78,72%	82,87%	61,19%	-	
10.	Besaran Kompetensi Calon Tenaga Kerja	-	-	15,28%	17,19%	19,10%	32,02%	21,21%	19,10%	-	
11.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun	-	-	1,89%	1,73%	1,57%	0,62%	-	1,57%	-	
12.	Rasio Penduduk yang Berwirausaha	-	-	3,95%	4,05%	4,15%	3,96%	-	4,15%		

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
13.	Jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)	-	-	300 peng usaha	350 peng usaha	400 peng usaha	319 peng usaha	65 peng usaha	400 peng usaha		
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	n/a	n/a	n/a	77,78%	-	n/a		
			1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	sesuai	sesuai	n/a		
			2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	n/a	n/a	n/a	11,53%	-	n/a		
			3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	5 perusaha an	5 perusaha an	5 perusaha an	5 perusaha an	-	5 perusaha an	5 perusaha an	
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,21%	1,24%	1,27%	40,14%	-	1,27%	1,27%	Capaian 2024 melonjak tajam karena menyesuaikan dengan PEDUM LPPD yang dikeluarkan tahun 2025
			1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	
			2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	
			3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	n/a	n/a	n/a	4,41%	-	n/a	n/a	
			4) Persentase LPK yang terakreditasi	n/a	n/a	n/a	16,67%	-	n/a	n/a	
			5) Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
			6) Jumlah penganggur yang dilatih	n/a	n/a	n/a	3.093 orang	-	n/a	n/a	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
			7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	
			8) Persentase penyerapan lulusan	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	
			9) Lulusan bersertifikat kompetensi	n/a	n/a	n/a	52,63%	-	n/a	n/a	
			10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	5 orang	5 orang	5 orang	15 orang	-	5 orang	5 orang	
			11) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	n/a	n/a	n/a	15 orang	-	15 orang	15 orang	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	n/a	n/a	n/a	83,34 miliar/ orang	-	38 juta rupiaj/tenaga kerja	38,25 juta rupiah/tenaga kerja	
			1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	n/a	n/a	n/a	2,70%	-	n/a	n/a	
			2) Data tingkat produktivitas total	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	12%	13%	14%	18,50%	-	18,7%	18,9%	
			1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	n/a	n/a	n/a	19,33%	-	n/a	n/a	
			2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
			3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	n/a	n/a	n/a	16 SP/PB	-	n/a	n/a	
			4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	n/a	n/a	n/a	92,59%	-	n/a	n/a	
			5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	n/a	n/a	n/a	55,93%	-	n/a	n/a	
			6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	n/a	n/a	n/a	0,62%	-	n/a	n/a	
			7) Jumlah mogok kerja	n/a	n/a	n/a	0	-	n/a	n/a	
			8) Jumlah penutupan perusahaan	n/a	n/a	n/a	1	-	n/a	n/a	
			9) Jumlah perselisihan kepentingan	n/a	n/a	n/a	0	-	n/a	n/a	
			10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	n/a	n/a	n/a	0	-	n/a	n/a	
			11) Jumlah perselisihan PHK	n/a	n/a	n/a	0	-	n/a	n/a	
			12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	n/a	n/a	n/a	106	-	n/a	n/a	
			13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	n/a	n/a	n/a	0	-	n/a	n/a	
			14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	n/a	n/a	n/a	ada	-	n/a	n/a	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
			15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	n/a	n/a	n/a	0%	-	n/a	n/a	
			Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	57,20%	58,03%	61,19%	78,72%	82,87%	61,19%	61,19%	
			1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	8.000 lowongan	9.000 lowongan	10.000 lowongan	17.958 lowongan	8.255 lowongan	10.000 lowongan	10.000 lowongan	
			2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	7.250 orang	7.250 orang	7.250 orang	9.657 orang	4.953 orang	7.250 orang	7.250 orang	
			3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	n/a	n/a	n/a	46 BKK	-	n/a	n/a	
			4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	84 orang	-	n/a	n/a	
			5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	n/a	n/a	n/a	6 orang	6 orang	n/a	n/a	
			6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	n/a	n/a	n/a	tidak ada	tidak ada	n/a	n/a	
			7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	n/a	n/a	n/a	0 PK	-	n/a	n/a	
			8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	n/a	n/a	n/a	0 orang	-	n/a	n/a	
			9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	5 orang	5 orang	5 orang	15 orang	-	5 orang	5 orang	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
			10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	n/a	n/a	n/a	93 orang	-	n/a	n/a	
			11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	n/a	n/a	n/a	tidak ada	-	n/a	n/a	
			12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	5 orang	5 orang	5 orang	tidak ada	-	n/a	n/a	
			13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	n/a	n/a	n/a	tidak ada	-	n/a	n/a	
			14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	n/a	n/a	n/a	tidak ada	-	n/a	n/a	
			Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	4,50%	-	n/a	n/a	
			1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	
			1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	n/a	n/a	n/a	100%	-	n/a	n/a	

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n/a	n/a	n/a	44,44%	-	n/a	n/a	
			1) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a	66,67%	-	n/a	n/a	
			2) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a	0%	-	n/a	n/a	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	n/a	n/a	n/a	0%	-	n/a	n/a	
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	0%	-	n/a	n/a	
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	-	n/a	n/a	
			1) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0,48%	0,56%	0,64%	0,70%	-	0,64%	0,64%	
			TRANSMIGRASI								

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025 s/d TW II	Tahun 2026	Tahun 2027	
			1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian kinerja bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri senantiasa berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Perindustrian terkait program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing.

Untuk Urusan Ketenagakerjaan, arah kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Dokumen Rencana Tenaga Kerja Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja
   a. Pengembangan sistem pelatihan dan sertifikasi berbasis kebutuhan pasar kerja.
   b. Peningkatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri (*link and match*).
   c. Penyesuaian kurikulum pelatihan dengan tuntutan industri 4.0 dan transformasi digital.
2. Perluasan dan Penciptaan Lapangan Kerja
   3. Mendorong investasi dan pengembangan sektor industri pengolahan serta sektor potensial lainnya.
   4. Fasilitasi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, termasuk penguatan pekerja mandiri dan *gig worker*.
   5. Pengembangan program perluasan kesempatan kerja di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.
3. Penguatan Perlindungan Tenaga Kerja
   a. Peningkatan pengawasan norma ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja.
   b. Penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
   c. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti pekerja perempuan, difabel, dan pekerja migran.
4. Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja Daerah
   a. Modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah.
   b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi instruktur pelatihan.
   c. Integrasi data lulusan pelatihan dengan sistem informasi pasar kerja nasional.

5. Penguatan Sistem Informasi Pasar Kerja
    a. Pengembangan dan integrasi sistem informasi pasar kerja berbasis digital.
    b. Penyediaan data ketenagakerjaan yang real-time dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
6. Sinergi dan Kolaborasi Antar Wilayah
    a. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan wilayah untuk pemerataan kesempatan kerja.
    b. Penguatan peran perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan.
7. Aparatur yang Sensitif dan Responsif
    a. Penguatan kapasitas aparatur perangkat daerah agar adaptif terhadap dinamika ketenagakerjaan.
    b. Pengembangan budaya pelayanan publik yang proaktif dan berbasis data

Sedangkan untuk Urusan Perindustrian, arah kebijakan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur dan Hilirisasi Industri
    a. Mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
    b. Pengembangan industri berbasis SDA (agro, tambang, sumber daya laut) dan industri dasar (kimia, logam, makanan dan minuman, tekstil, farmasi, elektronik, alat angkutan).
    c. Fokus pada industri prioritas yang berteknologi menengah-tinggi serta mendorong ekspansi global produk industri nasional.
2. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
    a. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan vokasi, dan penguatan kolaborasi dengan dunia usaha.
    b. Transformasi industri dari berbasis SDA menjadi berbasis inovasi dan teknologi.
    c. Penguatan ekosistem inovasi, riset, dan investasi di sektor industri prioritas.
3. Penguatan Industri Kecil dan Menengah
    a. Mendorong IKM sebagai rantai pasok industri nasional dan global.
    b. Fasilitasi akses pembiayaan, teknologi, dan pasar bagi IKM di daerah.

4. Mendorong Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular
    a. Penerapan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular di sektor prioritas (pangan, tekstil, konstruksi, plastik, elektronik).
    b. Penguatan kebijakan dan insentif untuk efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan limbah industri.
5. Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Lintas Wilayah
    a. Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia melalui pengembangan kawasan industri dan koridor ekonomi.
    b. Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan industri.
6. Substitusi Impor dan Peningkatan Ekspor
    a. Program substitusi impor pada sektor pangan, kimia, baja, tekstil, farmasi, dan alat kesehatan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan utilisasi produksi dalam negeri.
    b. Akselerasi ekspor produk dan jasa industri melalui penguatan daya saing dan integrasi rantai pasok global.
7. Transformasi Digital Industri
    a. Mendorong adopsi teknologi digital dan otomasi dalam proses produksi industri.
    b. Penguatan infrastruktur digital dan kompetensi SDM industri berbasis digitalisasi.

Kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait isu strategis urusan ketenagakerjaan, upaya yang perlu dilakukan untuk menjawab terkait isu tersebut adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja lokal serta mendorong sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
2. Mendorong investasi dan pengembangan kawasan industri untuk memperluas kesempatan kerja.
3. Memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
4. Mengoptimalkan digitalisasi data ketenagakerjaan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan.

Sedangkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah terkait isu strategis urusan perindustrian, upaya yang perlu dilakukan untuk menjawab terkait isu tersebut adalah:

1. Pengembangan kawasan industri dan peningkatan investasi sektor industri prioritas.
2. Fasilitasi penguatan IKM melalui akses pembiayaan, teknologi, dan pasar.
3. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam proses produksi.
4. Penguatan promosi dan fasilitasi perdagangan untuk memperluas pasar produk industri Jawa Tengah.
5. Sinergi dengan perangkat daerah lain untuk pemerataan pembangunan industri dan perdagangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berdasarkan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, untuk Urusan Ketenagakerjaan terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
   Pada 2024, TPT di Kabupaten Wonogiri sempat meningkat sebesar 2,40% akibat banyak perusahaan mengurangi karyawan atau melakukan PHK.
2. Pertumbuhan Angkatan Kerja Lebih Cepat dari Pertumbuhan Lapangan Kerja
   Jumlah angkatan kerja meningkat signifikan (713.252 orang pada 2023), namun pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding, sehingga menyulitkan penyerapan tenaga kerja.
3. Dominasi Sektor Pertanian dan Minimnya Industri
   Struktur ekonomi Wonogiri didominasi sektor pertanian (>28%), sedangkan wilayah ini bukan daerah industri sehingga kurang diminati investor. Letak geografis yang jauh dari pelabuhan, bandara, dan infrastruktur utama menjadi hambatan investasi industri.
4. Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang Rendah
   UMK Wonogiri pada 2025 ditetapkan Rp2.180.587, naik 6,5% dari tahun sebelumnya, namun tetap termasuk yang terendah di Jawa Tengah dan Soloraya. Rendahnya UMK ini menghambat daya tarik investasi dan kesejahteraan pekerja.
5. Kesenjangan Kompetensi dan Tingginya Tingkat Resign Tenaga Kerja Muda

Banyak lulusan SMA/SMK langsung bekerja tanpa keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Selain itu, pekerja muda cenderung mudah resign, menimbulkan tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja di perusahaan.

6. Keterbatasan Pelayanan dan Informasi Pasar Kerja
   Meski ada inovasi seperti layanan online pembuatan Kartu Kuning (AK/1), pelayanan dan penyediaan informasi lowongan kerja masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan menjangkau luas.
7. Persiapan dan Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
   Kesiapan CPMI masih menjadi masalah, termasuk dalam pelatihan dan perlindungan sebelum dan selama bekerja di luar negeri.

Sedangkan permasalahan dan hambatan untuk Urusan Perindustrian, diuraikan sebagai berikut:

1. Minimnya Investasi dan Pengembangan Industri
   Karena Wonogiri bukan daerah industri dan letak geografisnya kurang strategis, investasi industri masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
2. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Industri
   Jarak jauh dari pelabuhan, bandara, jalan tol, dan pusat perdagangan besar menghambat pengembangan industri dan distribusi produk industri lokal.
3. Dominasi Sektor Pertanian Menghambat Diversifikasi Ekonomi
   Ketergantungan pada sektor pertanian menyebabkan kurangnya pengembangan sektor industri dan manufaktur yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
4. Rendahnya Nilai Tambah dan Hilirisasi Produk Industri
   Belum optimalnya hilirisasi dan pengolahan sumber daya lokal menjadi produk industri bernilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing produk Wonogiri di pasar regional dan nasional.

Berkaitan dengan permasalahan dan hambatan di atas akan sangat berpengaruh atau berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan sumber daya manusia aparatur yang minim dan anggaran yang terbatas, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berupaya untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengadakan inovasi-inovasi guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam rangka mencapai target yang

telah ditetapkan, baik target strategis, target tahunan maupun target dalam *Sustainable Development Goals* (*SDGs*).

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

Tantangan

1. Kualitas SDM pencari kerja yang masih perlu ditingkatkan melalui program-program *upgrading softskill;*
2. Penanganan peserta pelatihan yang berasal dari generasi Z;
3. Mendorong perusahaan untuk berperan aktif dalam melaporkan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan;
4. Mewujudkan program pelatihan yang inovatif bagi masyarakat/pencari kerja;
5. Mendorong perusahaan untuk mempunyai alat HI (Hubungan Industrial) yang lengkap termasuk penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;
6. Peningkatan kapasitas SDM Bidang Perindustrian;
7. Peningkatan kualitas dan pemasaran produk industri.

Peluang

1. Peningkatan kompetensi bagi para pencari kerja melalui *upgrading softskill*, meskipun dengan kemampuan anggaran yang terbatas namun tetap berupaya untuk bekerja sama dengan sekolah maupun Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam rangka menciptakan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Penanganan pencari kerja dengan usia generasi Z melalui model komunikasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
3. Dalam menyikapi isu strategis wajib lapor lowongan pekerjaan, akan lebih memudahkan dalam membuat *link and match* antara kebutuhan tenaga kerja dan penyiapan ketersediaan tenaga kerja namun untuk teknisnya mungkin perlu formulasi khusus guna menunjang kelancaran program tersebut;
4. Melalui anugerah penghargaan yang diraih UPTD BLK Kabupaten Wonogiri dalam ajang Vokasi Award, diharapkan UPTD BLK mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Balai Pelatihan Vokasi dengan program-program pelatihan yang inovatif bagi masyarakat;
5. Mengundang HRD Perusahaan untuk mengikuti Bimtek Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;

6. Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha industri agar semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk industri;
7. Penggunaan bahan baku pilihan agar kualitas produk tetap terjaga dan memiliki daya saing yang kompetitif serta memiliki sasaran pasar yang tepat.

Berdasarkan dari isu-isu strategis nasional dan provinsi serta permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Wonogiri, maka untuk tahun 2025 memerlukan perumusan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran daerah pada umumnya serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri pada khususnya, maka dirumuskan program dan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut dalam :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
    1) Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
    2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
    3) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:
    1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi;
    2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
    3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
4. Program Hubungan Industrial, yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
    1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
    2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota.
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
    1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
    1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
    1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 pada kerangka pendanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Namun, seiring berjalannya proses dan tahapan perencanaan terdapat perubahan pendanaan pada program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka menyikapi kebijakan terkait efisiensi anggaran Kerangka pendanaan program dan kegiatan yang semula pagu indikatif totalnya sejumlah Rp 8.122.424.000,- untuk mendanai 8 (delapan) program yang terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan. Adapun uraian program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 7.193.910.000,00, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
    1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 9.999.000,00;
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 6.467.904,00;
    3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 1.100.000,00;
    4) Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 67.469.000,00;
    5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 35.000.000,00
    6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 548.981.000,00;
    7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 63.457.000,00.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 4.159.000,00, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
   1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro sebesar Rp 1.000.000,-;
   2) Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro sebesar Rp 3.159.000,-.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 716.770.000,00, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
   1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi sebesar Rp 710.771.000,00;
   2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp 2.999.000,00;
   3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sebesar Rp 3.000.000,00.
4. Program Penempatan Tenaga Kerja pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 133.441.000,00, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
   1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 89.302.000,00;
   2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja sebesar Rp 39.140.000,00;
   3) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 4.999.000,00.
5. Program Hubungan Industrial pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 24.872.000,00, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
   1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 6.019.000,00;
   2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 18.853.000,00.
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 23.775.000,00. Pada tahun 2026 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 10.129.000,00. Pada tahun 2026 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Rancangan Awal RKPD sebesar Rp 15.368.000,00. Pada tahun 2026 untuk program ini hanya direncanakan 1 (satu) kegiatan.

Adapun secara ringkasnya data perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	7.193.910.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100%	7.193.910.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	9.999.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	9.999.000	Direncana kan untuk persiapan penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan lainnya
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	6.467.904.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	100%	6.467.904.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	1.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase tertib administrasi kepegawaian	100%	1.100.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	67.469.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	100%	67.469.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	35.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	35.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	548.981.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	548.981.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	63.457.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	63.457.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
2.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase perusahaan yang telah menyusun rencana tenaga kerja	7,1%	4.159.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase perusahaan yang telah menyusun rencana tenaga kerja	7,1%	4.159.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah jenis dokumen PTK disusun	2 jenis	4.159.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah jenis dokumen PTK disusun	2 jenis	4.159.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,27%	716.770.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	1,27%	716.770.000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.580 peserta	710.771.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.580 peserta	710.771.000	Mengakomodir usulan musrenbang dan alokasi DBHCHT
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Program Pelatihan yang sudah link *and match* dengan Perusahaan	10 program	2.999.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah program pelatihan yang sudah link and macth dengan perusahaan	10 program	2.999.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	3.000.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase LPK yang Memiliki Perizinan	100%	3.000.000	
4.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	61,19%	133.441.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	61,19%	133.441.000	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	7.250 orang	89.302.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	7.250 orang	89.302.000	Rasionalisasi anggaran
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun *Link and Match* nya	10.000 lowongan kerja	39.140.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Lowongan Kerja yang Bisa Dibangun *Link and Match* nya	10.000 lowongan kerja	39.140.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang	4.999.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Pencari Kerja Migran yang Ditempatkan	100 orang	4.999.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dalam Kepmen 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhir an Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun an dan Keuangan Daerah tidak terdapat nomenklatur untuk kegiatan tersebut.
5.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta	14%	24.872.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar	14%	24.872.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BPJS Ketenagakerjaan)					Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan Yang mempunyai sarana HI	10 perusahaan	6.019.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan Yang mempunyai sarana HI	10 perusahaan	6.019.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan yang menindak lanjuti pembinaan ketenagakerjaan	10 perusahaan	18.853.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah Perusahaan yang menindak lanjuti pembinaan ketenagakerjaan	10 perusahaan	18.853.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB	17,85%	23.775.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB	17,85%	23.775.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase IKM yang diberdayakan	2%	23.775.000		Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase IKM yang diberdayakan	2%	23.775.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
7.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri	6%	10.129.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri	6%	10.129.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah IUI yang diterbitkan	12 IUI	10.129.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Jumlah IUI yang diterbitkan	12 IUI	10.129.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,64%	15.368.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	0,64%	15.368.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Cakupan wilayah informasi industri	16 Kecamatan	15.368.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	Cakupan wilayah informasi industri	16 Kecamatan	15.368.000	Penyesuaian kemampuan keuangan daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2026 tidak terdapat usulan musrenbang desa/kelurahan yang masuk ke dalam aplikasi SIPD-RI (Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah. ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produkstif dan Inklusif".*** Sasaran pembangunan tahun 2026,sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2026), yang mencakup optimalisasi Bulog, pengembangan lumbung pangan, peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah. Selain itu, aka nada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Gambar 3.1
Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Sasaran pembangunan pada Rancangan RKP Tahun 2025 yang ingin dicapai yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,8 – 6,3%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44 – 4,96%
3. Tingkat Kemiskinan 6,5 – 7,5%
4. Rasio Gini 0,377 – 0,380
5. Indeks Modal Manusia 0,57
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK 37,14%
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67

Untuk membangun dasar yang kokoh guna mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 dan mencapai target pembangunan tahun 2026, prioritas nasional yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 3.2
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Peraturan Menteri PPN Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026

3.1.1. Kementerian Ketenagakerjaan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029, dalam hal arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan, terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1:

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dan meningkatkan produktivitas pekerja di sektor prioritas. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas dilaksanakan dengan strategi:

1) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
2) Meningkatkan produktivitas pekerja;
3) Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri;
4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;
5) Melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
6) Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan;
7) Meningkatkan produktivitas tenaga kerja;
8) Menyusun standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kerja;

9) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pelatihan dan produktivitas.

Arah Kebijakan 2:

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan. Upaya penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

1) Meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan di dalam negeri;
2) Meningkatkan perlindungan dalam penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri;
3) Meningkatkan tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja;
4) Meningkatkan jumlah wirausaha baru melalui inkubasi bisnis
5) Melaksanakan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) melalui pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel;
6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan penempatan dan meningkatnya pelayanan informasi pasar kerja penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Arah kebijakan 3:

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dengan kepatuhan penerapan norma ketenagakerjaan. Upaya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan dengan strategi:

1) Meningkatkan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan;
2) Meningkatkan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
3) Meningkatkan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak;
4) Meningkatkan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja;

5) Meningkatkan kualitas dan pengelolaam keselamatan dan kesehatan kerja;
6) Menurunkan tingkat risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
7) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan;

Arah Kebijakan 4:

Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial pada perusahaan. Upaya pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan dengan strategi:

1) Meningkatkan kuantitas/kualitas kelembagaan hubungan industrial;
2) Meningkatkan penerapan kebijakantentang pengupahan serta struktur dan skala upah;
3) Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
4) Meningkatkan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dan pengusaha melalui pengaturan syarat kerja;
5) Meningkatkan program, manfaat, dan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
6) Peningkatan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja.

Arah Kebijakan 5:

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Lainnya, dengan sasaran program meningkatkan kapasitas, kinerja organisasi dan pelayanan internal. Upaya peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

1) Meningkatkan pelayanan perencanaan untuk mendukung kinerja dan akuntabilitas kementerian yang lebih baik;
2) Meningkatkan tata kelola keuangan kementerian;
3) Meningkatkan manajemen organisasi dan aparatur;
4) Meningkatkan kualitas penyusunan dan penataan perundang-undangan;

5) Meningkatkan kepuasan pengguna layanan umum dan pengelolaan arsip Kementerian Ketenagakerjaan;
6) Meningkatkan tindak lanjut atas kerja sama luar negeri;
7) Meningkatkan kemudahan akses, keterbukaan dan pelayanan informasi publik;
8) Meningkatkan SDM Kementerian Ketenagakerjaan yang kompeten sesuai dengan rencana pengembangan SDM;
9) Meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang ketenagakerjaan.

Arah Kebijakan 6:

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengawasan internal dalam mendukung *good governance* di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Upaya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kementerian ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakeijaan dilakukan dengan cara:

1) Mewujudkan pengawasan Inspektorat I yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
2) Mewujudkan pengawasan Inspektorat II yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
3) Mewujudkan pengawasan Inspektorat III yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
4) Mewujudkan pengawasan Inspektorat IV yang memberi kemanfaatan melalui pengendalian internal dan tata kelola berbasis risiko serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
5) Meningkatkan kualitas pelayanan internal dan ekstemal Inspektorat Jenderal.

Arah Kebijakan 7:

Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, dengan sasaran program meningkatkan kualitas

pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan secara elektronik. Perencanaan, penelitian dan pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan dengan cara:

1) Meningkatkan nilai indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Ketenagakerjaan;
2) Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja;
3) Meningkatkan nilai indeks pembangunan ketenagakerjaan;
4) Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang akurat dan terkini;
5) Meningkatkan hasil penelitian, dan kajian serta model yang bermanfaat;
6) Meningkatkan tata kelola manajemen internal dan dukungan teknis lainnya bidang perencanaan dan pengembangan ketenagakerjaan.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri juga ikut mendukung dan merencanakan program dan kegiatan yang sinkron terhadap arah kebijakan dan strategi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3.1.2. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020-2024, arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri, melalui 6 (enam) kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

1) Kebijakan pengembangan sumber daya industri;
   Kebijakan pengembangan sumber daya industri dilaksanakan melalui:
   a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran meningkatkan tenaga kerja industri yang kompeten; dan
   b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran yaitu:
      1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
      2) Penguatan implementasi *Making Indonesia 4.0*;
      3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri; dan

4) Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri.

2) Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri;

Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
   1) Meningkatkan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri; dan
   2) Meningkatkan infrastruktur kompetensi industri.
b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran terwujudnya sistem informasi industri yang andal dan efektivitas publikasi kinerja industri.
c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan 2 (dua) sasaran yaitu:
   1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas; dan
   2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri.

3) Kebijakan pemberdayaan industri;

Kebijakan pemberdayaan industri dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

a. Program nilai tambah dan daya saing industri dengan 4 (empat) sasaran yaitu:
   1) Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas;
   2) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri;
   3) Meningkatnya penguasaan pasar industri; dan
   4) Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM).
b. Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan sasaran meningkatnya fasilitasi halal dan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

4) Kebijakan pengembangan perwilayahan industri;

Kebijakan pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan melalui program nilai tambah dan daya saing industri dengan sasaran meningkatnya persebaran industri. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri bertujuan untuk

membangun pusat-pusat industri baru dalam rangka penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui:

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI).
b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
c. Kawasan Industri (KI).
d. Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM

5) Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal;

Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal diarahkan pada sasaran utama mempercepat pembangunan industri, melalui empat fokus kegiatan utama, yaitu:

a. Upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor industri dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas (peningkatan kinerja ekspordan kemampuan subtitusi impor, serta penyiapan SDM Industri yang kompeten);
b. Upaya penguatan dan pendalaman struktur industri nasional bagi investasi baru sektor industri (khususnya industri pioner) atau perusahaan industri existing yang melakukan perluasan komoditi baru;
c. Upaya mendorong industri melakukan inovasi, invensi dan penguasaan teknologi baru; dan
d. Upaya pemerataan pembangunan sektor industri di seluruh wilayah Indonesia.

6) Kebijakan reformasi birokrasi.

Kebijakan reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian dengan 3 (tiga) sasaran yaitu:

a. Terwujudnya tata kelola Kementerian yang efektif dan efisien;
b. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian; dan
c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta

memperkuat sektor perindustrian di Kabupaten Wonogiri dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang baik.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 tersebut yang menjadi pedoman dalam perumusan dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 ini.

Tujuan tersebut juga menjadi acuan dalam menentukan sasaran pada dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2026 ini, yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas;
2) Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
3) Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah;
4) Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah;
5) Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menjalankan pembangunan bidang tenaga kerja dan perindustrian pada Tahun 2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pada dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029, dimana di dalamnya memuat kerangka program, kegiatan, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan Tahun 2026. Adapun program yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan mencakup 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yang sangat mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana sudah dirumuskan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Untuk Tahun 2026, adapun target yang akan dicapai adalah untuk Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat sektor perindustrian di Kabupaten Wonogiri; dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang baik sebesar 38 juta rupiah per tenaga kerja pada target kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Adapun total pagu indikatif yang akan digunakan untuk menjalankan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri adalah sebesar Rp 8.122.424.000,00 (Delapan milyar serratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

PROGRAM NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Program Penempatan Tenaga Kerja.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4. Program Hubungan Industrial.

PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

KEGIATAN NON URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
3. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
4. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
5. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.

6. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
7. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Wonogiri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN						**8.122.424.000,00**							**7.825.532.829,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.073.152.000,00**							**7.728.533.229,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**8.073.152.000,00**							**7.728.533.229,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**7.193.910.000,00**						**-**	**7.225.991.735,00**	
		[Meningkatnya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah]	*Jumlah Inovasi Perangkat Daerah*	1	2		1									
			Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100%	100%		100%									
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	78,30		78,60									
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	42	37		40									
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun*	-			100 %	9.999.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	19.999.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	9.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		19.999.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun*	-			100 %	6.467.904.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	6.493.558.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	6.467.904.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		6.493.558.118,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi kepegawaian*	-			100 %	1.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	9.996.192,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	1.100.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		9.996.192,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah*	-			100 %	67.469.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	79.999.360,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											asan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif				
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.799.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		11.999.660,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	3.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.999.700,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	10.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan partisipatif				
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	38.671.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah*	-			100 %	35.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	35.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	548.981.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penc	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	548.981.015,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif				
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	151.800.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		151.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				19 Laporan	396.181.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		396.181.015,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											judi, dan penyeludupan.	transparan dan partisipatif				
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	-			100 %	63.457.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	63.457.300,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	39.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		39.999.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	3.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17.960.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Memperkuat reformasi politik,	Penguatan tata kelola pemerintah	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		17.960.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										TAHUN SEBELUMNYA	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	an dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif				
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	2.498.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif 7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		2.498.100,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**4.159.000,00**						**-**	**104.999.800,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah jenis dokumen PTK disusun*	-			2 jenis	4.159.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	104.999.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				5 Orang	3.159.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		4.999.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi***	**-**			**1,27 %**	**716.770.000,00**						**-**	**223.348.944,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi*	-			2.580 Peserta	710.771.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya	Penguatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	217.348.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				2.000 Orang	645.643.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	15.129.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		17.349.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	49.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		49.999.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Program Pelatihan yang sudah link and match dengan perusahaan*	-			10 Program	2.999.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	2.999.994,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				28 Lembaga	2.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		2.999.994,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase LPK yang Memiliki Perizinan*	-			100 %	3.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				7 Perizinan	3.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan***	**-**			**61,19 %**	**133.441.000,00**						**-**	**143.497.780,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan*	-			7.250 Orang	89.302.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	91.721.470,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				5000 Orang	25.226.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		25.499.880,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1.200 Orang	33.711.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		34.999.740,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				10 Orang	30.365.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan mening	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan b	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		31.221.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	erkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun link and matchnya*	-			10.000 Lowongan Kerja	39.140.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	46.776.440,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	9.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, menge	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		9.999.650,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											mbangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				600 Orang	2.365.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		9.999.840,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				750 Orang	26.776.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemen	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		26.776.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	uhan Perlin dungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pencari kerja migran yang ditempatkan*	-			100 Orang	4.999.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	4.999.870,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				30 Orang	4.999.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		4.999.870,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)***	-			**14 %**	**24.872.000,00**						-	**30.694.970,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana HI*	-			10 Perusahaan	6.019.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	8.999.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	3.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	3.019.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3.999.990,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan ketenagakerjaan*	-			10 Perusahaan	18.853.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	21.694.980,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	4.197.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		5.197.420,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	3.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	10.497.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		10.497.880,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif				
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				600 Orang	1.159.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 5. Penuntasan kemiskinan dan Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan basis data Tunggal yang integratif	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		1.999.680,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**49.272.000,00**							**96.999.600,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**49.272.000,00**							**96.999.600,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase Kontribusi sektor industri dalam PDRB***	**-**			**17,85 %**	**23.775.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase IKM yang diberdayakan*	-			2 %	23.775.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan				
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	23.775.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase Peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)***	**-**			**6 %**	**10.129.000,00**						**-**	**12.000.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah IUI yang diterbitkan*	-			12 IUI	10.129.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berbasis potensi unggulan				
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	5.363.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	4.766.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)***	**-**			**0,64 %**	**15.368.000,00**						**-**	**24.999.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Wilayah Informasi Industri*	-			16 Kecamatan	15.368.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	-	24.999.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	9.368.000,00	Kab. Wonogiri, Wonogiri, Giripurwo	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		14.999.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi unggulan				
	J U M L A H							8.122.424.000,00							7.825.532.829,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk pencapaian tujuan tahun 2025-2029, dilakukan penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 mencakup program dan kegiatan pokok dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri
Tahun 2026

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**		**8.073.152.000**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WONOGIRI**	**Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah**	**7.193.910.000**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	**9.999.000**
2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.000
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	**6.467.904.000**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.467.904.000
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tertib administrasi kepegawaian	**1.100.000**
2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.100.000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah	**67.469.000**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000
2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.799.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.999.000

2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.671.000
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	**35.000.000**
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35.000.000
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**548.981.000**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	151.800.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	396.181.000
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	**63.457.000**
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39.999.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.000.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17.960.000
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.498.000
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**4.159.000**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun	**4.159.000**
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	**1.000.000**

2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	3.159.000
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	**716.770.000**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	**710.771.000**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	645.643.000
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15.129.000
2	07	03	2.01	0002	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	49.999.000
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Jumlah Program Pelatihan yang sudah *link and match* dengan perusahaan	**2.999.000**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2.999.000
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	Persentase LPK yang Memiliki Perijinan	**3.000.000**
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3.000.000
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	**133.441.000**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	**89.302.000**
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25.226.000
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	33.711.000

2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30.365.000
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun *link and match* nya	**39.140.000**
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9.999.000
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.365.000
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	26.776.000
2	**07**	**04**	**2.04**		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pencari kerja migran yang ditempatkan	**4.999.000**
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	4.999.000
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	**24.872.000**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang mempunyai Sarana HI	**6.019.000**
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	3.000.000
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3.019.000
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti Pembinaan Ketenagakerjaan	**18.853.000**

2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4.197.000
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	3.000.000
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10.497.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.159.000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		**49.272.000**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	**23.775.000**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Persentase IKM yang diberdayakan	**23.775.000**
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	23.775.000
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	**10.129.000**
3	**31**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah IUI yang diterbitkan	**10.129.000**
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	5.363.000

						sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4.766.000
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	**15.368.000**
3	**31**	**04**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan Wilayah Informasi Industri	**15.368.000**
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6.000.000
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	9.368.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri tahun 2026. Penyusunan Renja tahun 2026 lebih bersifat operasional sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud, sehingga akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renja akan menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tahun 2026.

Perubahan berbagai kebijakan ketenagakerjaan dan perindustrian sangat sulit diprediksi sehingga pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tahun 2026 ini dapat saja berubah, namun secara prinsip seluruh yang tertuang dalam Renja ini merupakan hasil kajian terhadap seluruh kebutuhan program dan kegiatan. Perubahan yang terjadi tetap dalam upaya pencapaian sasaran utama bidang ketenagakerjaan dan perindustrian di Kabupaten Wonogiri sehingga diharapkan seluruh unsur di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tetap selalu menjadikan Renja ini sebagai pedoman utama dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renja sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif dan komitmen yang kuat serta koordinasi yang kuat dari semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri. Hasil kinerja Renja nantinya akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja di tahun berikutnya sehingga kinerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri dapat terukur, bermanfaat dan berkesinambungan.

Di tahun 2026 dengan memperhatikan penilaian SAKIP, maka akan meningkatkan nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten

Wonogiri dengan memenuhi rekomendasi SAKIP yang ada pada Lembar Hasil Evaluasi (LHE).

Dokumen Renja 2026 yang telah tersusun ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menjalankan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ada dan dianggarkan di tahun 2026 terutama dalam menjawab Sasaran "Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang berkualitas; Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; Meningkatnya partisipasi IKM dalam perekonomian daerah; dan Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah; serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah yang baik". Pada bab penutup ini Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 mencakup empat bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses perumusannya melibatkan level paling bawah melalui aplikasi SIPD Kabupaten Wonogiri dan setelahnya juga dilakukan reviu Renja.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan *(stakeholders)* tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian

yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan anggaran Tahun Anggaran 2026.

d. Manajemen Risiko

Dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, diperlukan manajemen risiko agar dapat meminimalisir ketidaktercapaian Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan. Maka, dalam dokumen ini disajikan tabel pengendalian risiko terhadap Program dan Kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5.1
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

No	Misi	Program	Indikator Program	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang difokuskan untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif, menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah dan membangun infrastruktur distribusi barang dan jasa.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Adanya ketidaktertiban waktu pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah	6	Manajemen waktu penyelesaian pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah yang kurang efektif	Keterlambatan pelaporan kinerja administrasi pemerintah daerah		
2		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kurangnya pemahaman perusahaan mengenai pentingnya untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	6	Masih banyak perusahaan yang belum dilakukan pembinaan penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Perusahaan tidak dapat melengkapi persyaratan ketenagakerjaan di WLKP Online		
3		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Kurangnya kepatuhan pencari kerja dan perusahaan dalam melaporkan penempatan	6	Kurangnya edukasi untuk perusahaan dan pencari kerja dalam melaporkan penempatan	Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan belum terdata dalam sistem informasi ketenagakerjaan	Sosialisasi dan optimalisasi penggunaan aplikasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Rendahnya kompetensi atas implementasi hasil pelatihan	6	Kurangnya pengembangan program keterampilan kompetensi bagi calon tenaga	Peserta pelatihan/Calon tenaga kerja yang kurang kompeten cenderung menghasilkan	Melakukan audit kebutuhan dan revitalisasi kurikulum serta pengembangan program pelatihan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No	Misi	Program	Indikator Program	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kerja/peserta pelatihan	pekerjaan yang tidak optimal, sehingga mengurangi efisiensi dan produktivitas perusahaan.		
5		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Belum optimalnya sarana hubungan industrial yang diterapkan di perusahaan	6	Keterbatasan SDM untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan terkait sarana hubungan industrial	Kurangnya kepastian hukum bagi pekerja dan perusahaan serta kurangnya perlindungan terhadap pekerja	Memandu perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan secara langsung	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase kontribusi sektor industri dalam PDRB	Industri pengolahan sebagai pembentuk utama PDRB sektor industri belum tumbuh sesuai harapan	6	Kualitas produk IKM Wonogiri kurang dapat bersaing	Menurunnya permintaan produk IKM Wonogiri		
7		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase peningkatan jumlah pelaku industri (unit usaha)	Data pelaku usaha industri (IKM) belum valid dan belum lengkap	6	Komponen data dalam pendataan IKM belum lengkap dan pelaksanaan sinkronisasi data hasil pendataan	Terhambatnya proses analisa kebijakan industri karena data kurang valid		

No	Misi	Program	Indikator Program	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dinas untuk diproses oleh DPMPTSP terkait perijinannya belum optimal			
8		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Proporsi pelaku usaha industri yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Data industri yang ada dalam SIINAS belum valid dan belum *update*	6	Kurangnya pemahaman para pelaku industri mengenai pelaporan usahanya pada aplikasi SIINAS	Terhambatnya proses analisa kebijakan industri karena data kurang valid		

Tabel 5.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

No	Misi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang difokuskan untuk mendorong sektor ekonomi yang produktif, menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah dan membangun infrastruktur distribusi barang dan jasa.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tidak tepat waktu	6	Minimnnya SDM di Sub Bagian Perencanaan	Menghambat pencapaian target nilai SAKIP Dinas		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun	Penyusunan administrasi keuangan daerah yang kurang valid	4	Pengolahan data keuangan pada aplikasi SIPKD kurang maksimal	Laporan keuangan yang kurang akuntabel		
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian	Pengelolaan administrasi kepegawaian yang kurang tertib	6	Kurangnya SDM di bagian kepegawaian yang menguasai pengelolaan administrasi kepegawaian	Adanya administrasi kepegawaian yang kurang lengkap		
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	Kurangnya fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	2	Karena minimnya anggaran	Terlambatnya pelaporan fasilitasi administrasi umum perangkat daerah		
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah kurang maksimal	6	Karena minimnya anggaran	Kecilnya persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang		

No	Misi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tersedia		
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Penurunan jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4	Karena minimnya anggaran	Hanya sebagian kecil barang milik daerah yang dipelihara		
7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	Kurangnya Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	4	Minimnya anggaran	Aktivitas bekerja dan pelayanan terhambat		
8		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah jenis dokumen RTK yang disusun	Masih banyaknya perusahaan yang belum memahami pentingnya penyusunan Dokumen RTK Mikro	4	Kurangnya pemahaman tentang prosedur penyusunan RTK Mikro	Target pemenuhan penyusunan RTK Mikro tidak tercapai		
9		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	Kurangnya kepatuhan pencari kerja dan perusahaan dalam melaporkan penempatan	9	Kurangnya edukasi untuk perusahaan dan pencari kerja dalam melaporkan penempatan	Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan belum terdata dalam sistem informasi ketenagakerjaan	Sosialisasi dan optimalisasi penggunaan aplikasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
10		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang bisa dibangun *link and match* nya	Adanya lowongan yang tidak valid dan pemberi kerja belum semua mendaftarkan lowongan melalui	6	Tersebarnya info lowongan yang tidak valid karna kurangnya validasi oleh petugas yang berwenang	Kerugian bagi pencari kerja dan pemberi kerja dengan beredarnya info lowongan yang		

No	Misi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				aplikasi ketenagakerjaan			tidak valid		
11		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja migran yang ditempatkan	Prosedur Pemberangkatan PMI kurang dipahami oleh Calon Pekerja Migran Indonesia	6	Pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia masih rendah	Adanya Pekerja Migran Indonesia yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur		
12		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi	Rendahnya kompetensi atas implementasi hasil pelatihan	9	Kurangnya pengembangan program keterampilan kompetensi bagi calon tenaga kerja/peserta pelatihan	Peserta pelatihan/Calon tenaga kerja yang kurang kompeten cenderung menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal, sehingga mengurangi efisiensi dan produktivitas perusahaan.		
13		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Program Pelatihan yang sudah *link and match* dengan perusahaan	Banyaknya Program Pelatihan yang masih belum pas/ missmatch dengan yang dibutuhkan perusahaan	6	Karena forum baru terbentuk di akhir tahun n-1 sehingga perlu re-organisasi	Kesepakatan/hasil koordinasi belum optimal pemanfaatannya	Melakukan audit kebutuhan dan revitalisasi kurikulum serta pengembangan program pelatihan	Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang Memiliki Perijinan	Masih adanya LPK yang belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan pelatihan	6	Aplikasi/website layanan perizinan dan SDM kurang memadai	Masih rendahnya lembaga pelatihan berizin yang terintegrasi ke oss.go.id		

No	Misi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mempunyai Sarana HI	Belum optimalnya sarana HI yang diterapkan di perusahaan	9	Minimnya kepedulian perusahaan untuk membentuk atau menyusun sarana HI di perusahaannya	Terjadinya konflik ketenagakerjaan dan tidak optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja		
16		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang menindaklanjuti Pembinaan Ketenagakerjaan	Belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan khususnya ketenagakerjaan oleh perusahaan secara benar	4	Kurangnya/minimnya tenaga teknis di bidang hubungan industrial yaitu Mediator Hubungan Industrial	Penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan belum optimal	Memandu perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan secara langsung	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
17		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang diberdayakan	Pelatihan dalam rangka pemberdayaan yang diberikan tidak diterapkan oleh IKM	6	Kapasitas dan kompetensi SDM IKM (khususnya Industri kecil baru) terbatas	Produk IKM kurang berdaya saing		
18		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Jumlah IUI yang diterbitkan	Pelaku usaha industri khususnya industri kecil belum memahami peraturan atau regulasi formal perijinan industri	6	Kurang optimalnya sosialisasi perolehan izin usaha industri bagi pelaku usaha industri	Banyak pelaku usaha industri khususnya Industri Kecil belum memiliki izin usaha yang dapat menghambat		

No	Misi	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota					pemasaran produknya secara mandiri		
19		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Informasi Industri	Pelaku usaha industri belum melaporkan kegiatan usahanya di SIINAS	8	Kurangnya pemahaman pelaku usaha industri terkait kewajiban melaporkan usahanya di SIINAS	Data industri yang belum lengkap dan update dapat menghambat proses analisa kebijakan industri		

Wonogiri, Agustus 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

WIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700904 199803 1 009